

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

TAHUN 2023



Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kab. Lamongan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Tujuan disusunnya LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaannya. Selanjutnya kami berharap bahwa LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023 bisa dijadikan salah satu bahan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Lamongan, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



dr. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199303 2 007

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Cover | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok Fungsi Dan Struktur Organisasi | 2 |
| C. Data Umum Organisasi | 8 |
| D. Sistematika Penyajian LKjIP..... | 11 |
| BAB II | 12 |
| A. Rencana Strategis | 12 |
| B. Rencana Kinerja, Program Dan Kegiatan Tahun 2023 | 15 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 18 |
| BAB III | 29 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 29 |
| A. 1 Pencapaian Kinerja Tahun 2023..... | 29 |
| A. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2023..... | 30 |
| A. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA | 31 |
| A. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional | 33 |
| A. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan..... | 33 |
| A. 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana) | 35 |
| A. 7 Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja..... | 38 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 39 |
| BAB IV | 49 |
| Penutup | 49 |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 50 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023. LKjIP OPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang kian hari semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang *starting point* pada arah dan kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berdasar Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi *gap* (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Pembinaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pembinaan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pembinaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
6. Pembinaan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;

7. Pembinaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Penyelenggaraan pelayanan KB;
9. Pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Pengendalian administrasi dinas bidang urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
12. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dibantu oleh:

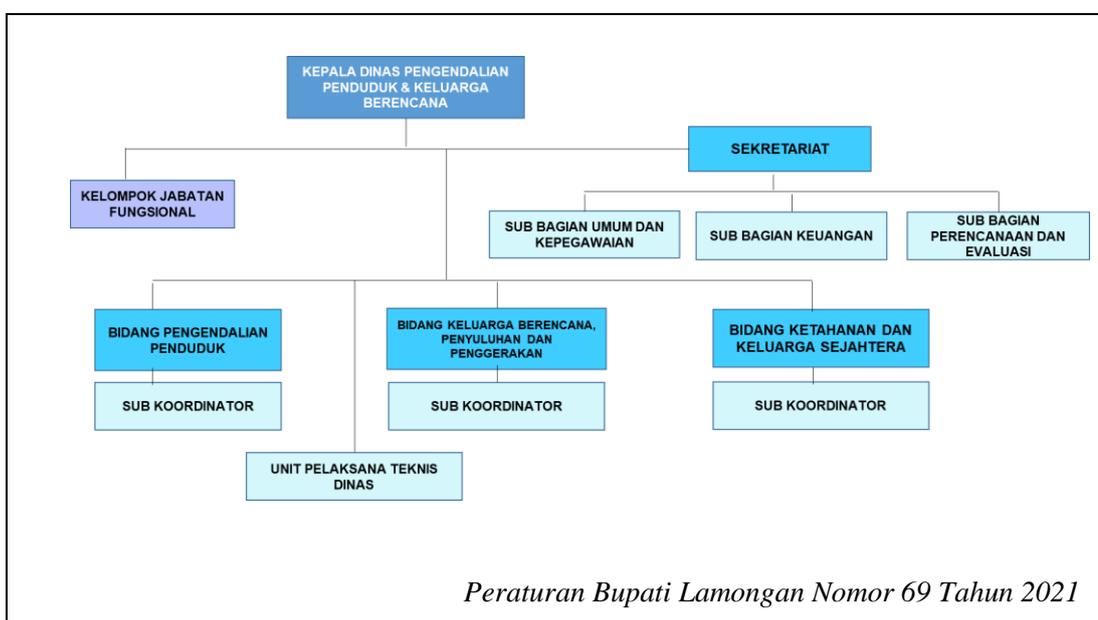
1. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan , keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol, dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan Pembinaan jabatan fungsional;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - c. Penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pengendalian Penduduk;
 - d. Penyelenggaraan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten;
 - f. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk; dan
 - g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/di bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. Pengoordinasian dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - c. Penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;

- d. Penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan KB Kabupaten;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesertaan ber KB di Daerah;
 - g. Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - h. Penyelenggaraan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerakan
 - k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
 - b. Penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
 - e. Penyelenggaraan Jambore Kader Tribina (Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Keluarga Remaja, UPPKS);
 - f. Pembentukan kelompok Ketahanan dan Keluarga Sejahtera (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS);
 - g. Pelaksanaan dan atau pemberian dukungan survey Indeks Pembangunan Keluarga; dan

- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**



Maksud penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun anggaran 2023;
2. Sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan didukung oleh 38 orang personil sebagaimana tabel I sebagai berikut.

Tabel I
Personil
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

| No | Jabatan/Eselon | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Eselon II.b | 1 |
| 2. | Eselon IIIa | 1 |
| 3. | Eselon III.b | 3 |
| 4. | Eselon IV.a | 3 |
| 5. | Pejabat Fungsional | 7 |
| 6. | Staf | 23 |
| | Jumlah | 38 |

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II, berikut ini:

Tabel II
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

| No | SKPD | BARANG (Unit) | | |
|----|---|---------------|---------------------------------|---------|
| | Jenis Sarana Prasarana | BAIK | Rusak Atau Tidak Dikuasai | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) |
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| 1 | Tanah | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Roda 4 (Empat) | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Rak Besi/ Metal | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Rak Kayu | 34 | 0 | 34 |
| 5 | Filling Besi/ Metal | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Papan Nama Instansi | 25 | 0 | 25 |
| 7 | Papan Pengumuman | 1 | 0 | 1 |
| 8 | White Board | 41 | 0 | 41 |
| 9 | Faximile | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Layar LCD | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lemari Kayu | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Lemari Arsip | 14 | 0 | 14 |
| 13 | Kursi Besi/ Metal | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Meja Rapat | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Kursi Tamu | 9 | 0 | 9 |
| 16 | Kursi Puter | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Kursi Kerja | 46 | 0 | 46 |
| 18 | Kursi Rapat | 90 | 0 | 90 |
| 19 | Sofa | 29 | 0 | 29 |
| 20 | Rak Buku | 6 | 0 | 6 |
| 21 | Mesin Penghisap Debu | 2 | 0 | 2 |
| 22 | AC Split | 17 | 0 | 17 |
| 23 | Kipas Angin | 22 | 0 | 22 |
| 24 | Unit Power Supply | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Lambang garuda pancasila | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 26 | Gambar Presiden/ Wakil Presiden | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Tiang Bendera | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Water Filter | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Tangga Aluminium | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Alat Pemadam /Portble | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Personal Komputer | 40 | 0 | 40 |
| 32 | Lap top/Note Book | 31 | 0 | 31 |
| 33 | Printer | 66 | 0 | 66 |
| 34 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 9 | 0 | 9 |
| 36 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 11 | 0 | 11 |
| 37 | Meja Kerja Pegawai non Struktural | 32 | 0 | 32 |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 12 | 0 | 12 |
| 40 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 10 | 0 | 10 |
| 41 | Kursi Kerja Pegawai non Struktural | 32 | 0 | 32 |
| 42 | Camera + attachmen | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Microphone/ Wirelees Mic | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Slide Projektor | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Layar LCD | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Rol Meter | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Pesawat Telepon | 8 | 0 | 8 |
| 48 | Handy Talky (HT) | 4 | 0 | 4 |
| 49 | Bangunan Gedung | 28 | 0 | 28 |
| 50 | Jembatan | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Instalasi | 8 | 0 | 8 |
| 52 | Jaringan | 16 | 0 | 16 |
| 53 | Buku Perpustakaan | 0 | 1210 | 1210 |
| 54 | Sepeda Motor | 150 | 12 | 162 |
| JUMLAH | | 861 | 1224 | 2085 |

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 22.296.081.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.600.178.460 atau 96,88%.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

LKjIP OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang, Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Gambaran Umum Organisasi, dan Sistematika penyajian LKjIP Tahun 2023;
2. **Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, bab ini memuat tentang: a) Rencana Strategis, yang terdiri dari: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran serta Program dan Kegiatan. b) Rencana kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023. c) Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. **Bab III: Akuntabilitas Kinerja**, memuat tentang: a). Capaian Kinerja Organisasi, b). Realisasi Anggaran Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023
4. **Bab IV : PENUTUP**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan strategi bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumberdaya manusia,

infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.

3. Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, mengikuti Misi Ke 2 (dua) dari RPJMD yaitu: **“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman”**.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mampu mencapai **tujuan dan sasaran**.

Adapun tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

| Tujuan | Indikator |
|--|---|
| Meningkatkan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TRF) per WUS usia 15-49 Tahun |

Sasaran adalah merupakan rangkaian capaian perencanaan strategik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan Rencana Strategik (RENSTRA). Selaras dengan kebijakan dalam RPJMD, maka RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menentukan Sasaran dan indikator kinerja sasaran yaitu :

| Sasaran | Indikator |
|-------------------------------|--|
| Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) |

Adapun keserasian program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

| Sasaran RPJMD 2021 – 2026 | Anggaran Belanja Menurut Urusan Wajib Permendagri No.13 Tahun 2006 | Indikator Sasaran |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate / mCPR) |

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan DPPKB memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh DPPKB pada Tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan *Good Governance* dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan.

Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar suatu organisasi yang dalam hal ini DPPKB dapat mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat apabila kinerja dari organisasi tersebut dapat dicapai. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk itu dalam Rencana Kinerja Tahunan, ditetapkan beberapa indikator kinerja untuk mengukur apakah kinerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut dapat tercapai atau tidak. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dari tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan tahap setelah kegiatan selesai.

Indikator kinerja tersebut juga digunakan untuk meyakinkan bahwa terdapat kemajuan kinerja dalam rangka tercapainya Tujuan dan Sasaran DPPKB. Dalam penetapan indikator kinerja terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : (a) spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi, (b) dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, (c) menangani aspek-aspek yang relevan, harus penting atau dapat menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses, (d) efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah dengan biaya yang tersedia.

Dalam Rencana Kinerja DPPKB terdapat dua macam indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu Indikator output dan indikator outcome. Dengan membandingkan keluaran/ output dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Indikator output dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefisi dengan baik dan terukur. Sedangkan Indikator Outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun output telah tercapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2021-2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kegiatan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Program Pengendalian Penduduk
 - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator program IKM terdiri dari 7 Kegiatan antara lain:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Presentase Kebutuhan Data Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Yang Tersedia Akurat dan Tepat Waktu yang ada dengan 2 Kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator program yaitu Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan rincian Kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pemilihan Kesertaan ber-KB

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang memiliki indikator Cakupan Anggota Poktan Yang Aktif Dalam Pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL dengan kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Berikut akan disampaikan secara terlampir Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung capaian Rencana Strategis 2023, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengadakan perjanjian kinerja dengan Bapak Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian Kinerja yang dimaksud merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bapak Bupati Lamongan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini disusun dengan tujuan :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen;
- c) Sebagai dasar penilaian dan dan pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan/ sanksi;
- f) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja secara hierarki dari Eselon II sampai dengan staf. Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Eselon II s.d. Eselon IV
DPPKB Kab. Lamongan

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|--------------|--|--|--------|--|----------------|
| 1. | Kepala Dinas | Mengendalikan angka kelahiran | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Contraceptive Rate/mCPR) (%) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Contraceptive Rate/mCPR) (%) | 79,41% | Program Pengendalian Penduduk | 349.068.400 |
| | | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 6.235.746.000 |
| | | | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 7.256.130.000 |
| | | Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai IKM Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 79. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8.455.136.600 |
| 2. | Sekretaris | Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Tersedia Tepat Waktu | 100% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 411.800.000 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|---------|---|---|--------|--|----------------|
| | | Kinerja | | | | |
| | | Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu | 100% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.042.621.294 |
| | | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tepat waktu | 100% | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 53.282.000 |
| | | Meningkatnya pengadministrasian umum perangkat daerah | Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah | 100% | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 122.996.000 |
| | | terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah | presentase tercapainya sarana dan prasarana kantor yang tersedia | 100% | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 227.232.500 |
| | | terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup DPPKB | 100% | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 715.766.000 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|-----------------------------|---|---|-----------|---|----------------|
| | | terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan kondisi baik | 100% | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.881.438.806 |
| 3. | Kabid Pengendalian Penduduk | Terlaksananya survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan | Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan | 1 Kali | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 62.268.400 |
| | | Tersusunnya kajian dampak kependudukan dan tersedianya parameter analisis dampak kependudukan | Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang tersedia | 1 Dokumen | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 286.800.000 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|--|--|---|-----------|--|----------------|
| 4. | Kabid Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Penggerak | Terlaksananya kegiatan pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | Jumlah Toga Toma sebagai mitra kerja yang aktif melaksanakan KIE | 865 Orang | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.903.850.000 |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan | Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik | 78 Orang | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 1.598.400.000 |
| | | Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat/cara KB (unmeetneed) | 6,7% | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 948.396.000 |



| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|--|--|--|--------------|---|----------------|
| | | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan kesertaan ber-KB | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah yang berpartisipasi dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB | 1 Organisasi | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 1.785.100.000 |
| 5. | Kabid Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera | Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayah desa yang ditentukan | Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapat Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 7.126.130.000 |



| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|----------------------------------|--|--|--------------|--|----------------|
| | | Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Organisasi masyarakat Tingkat Daerah dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2 Organisasi | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 130.000.000 |
| 6. | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000 |
| | | Tersusunnya laporan capaian kinerja tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 312.000.000 |
| | | Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 74.800.000 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|------------------|--|--|--------------|--|----------------|
| | | daerah | | | | |
| 7. | Kasubag Keuangan | Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan perangkat daerah | Jumlah Pengajuan pengajuan gaji dan tunjangan yang dibayarkan | 12 Pengajuan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.913.421.294 |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Keuangan BOKB | Jumlah Koordinasi Penatausahaan Keuangan BOKB yang dilaksanakan | 5 Kali | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 64.200.000 |
| | | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 32.196.300 |
| | | Tersusunnya Laporan Bulanan/ Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 32.803.700 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|------------------------------|---|---|-----------|--|----------------|
| 8. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 53.282.000 |
| | | Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.500.000 |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 11 Paket | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.749.700 |
| | | Terpenuhiya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 11 Paket | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 41.680.200 |
| | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.460.600 |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.644.500 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|---------|---|--|--|--|----------------|
| | | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.961.000 |
| | | Tersediaya mebel yang dibutuhkan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Filing Kabinet; 7 Lemari Arsip | Pengadaan Mebel | - |
| | | Tersedianya peralatan dan mesin yang dibutuhkan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit Komputer, 3 Notebook, 4 Printer | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 227.232.500 |
| | | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 128.400.000 |
| | | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 587.366.000 |
| | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit Roda Empat | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.619.406 |

| No | Jabatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|---------|---|--|-------------------------------------|--|----------------|
| | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit Roda Empat; 25 Unit Roda Dua | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.866.400 |
| | | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.800.000 |
| | | terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Gedung | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.783.153.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

| No | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Lebih dari 100 % | Baik sekali (BS) |
| 2. | Lebih dari 75 % s.d 100 % | Baik (B) |
| 3. | 55 % s.d 75 % | Cukup C |
| 4. | Kurang dari 55 | Kurang (K) |

A.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Adapun analisis capaian kinerja tersebut perlu dilakukan dengan cermat, agar dapat diketahui bersama apakah setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sudah tercapai dengan baik, ataukah masih ada kekurangan dalam

perencanaan atau pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sehingga perlu dilakukan berbagai perbaikan.

Tabel 3.1
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
PADA DPPKB KAB. LAMONGAN

| No | Sasaran | Indikator | Tahun 2023 | | |
|----------|-------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) | 79.41% | 82,80% | 104% |

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2021-2026). Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari semua indikator kinerja utama dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam kategori capaian ”**Baik Sekali**”.

A. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi Kinerja Th. 2023 | Realisasi Kinerja Th. 2022 |
|----------|-------------------------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) | 79.41% | 82,80% | 81,46% |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi Kinerja Th. 2023 | Realisasi Kinerja Th. 2022 |
|----|---|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Kebutuhan Data Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia akurat dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Program Pembinaan Keluarga Berencana | Persentase KB MKJP | 22,24% | 22,29% | 22,22% |
| 3. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Cakupan Anggota yang aktif dalam pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL | 70,52% | 70,57% | 70,74% |

A. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA

Untuk mewujudkan Misi ke-2 dalam RPJMD Kabupaten Lamongan (2021-2026) yaitu "Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman". Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat. Sehingga ditetapkan tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana", serta sasarannya yaitu "Mengendalikan Angka Kelahiran" yang diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

| No. | Tujuan | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Kondisi Awal Kinerja | Target | | | | | Tahun 2022 | | |
|-----|--|---|-------------------------------------|------------|----------------------|--------|------|------|------|------|------------|--------------------|---------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Meningkatkan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TRF) per WUS usia 15-49 Tahun | $ASFR_i = \frac{bi}{pi^f} \times k$ | Persen (%) | 1,91 | 1,89 | 1,87 | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,89 | Nilai belum keluar | |

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran | No | Indikator | Formula Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | | Tahun 2023 | | | PD Yang Menangani Urusan |
|----|-------------------------------|----|--|--|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Mengendalikan Angka Kelahiran | 1. | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (<i>modern Contraceptive Rate</i> (mCPR)) | $\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ | 79,30% | 79,40 | 79,41 | 79,42 | 79,43 | 79,44 | 79,41 | 82,80 | 104% | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) |

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

| No | Sasaran | Indikator | Formula Indikator | Target dalam Renstra (2023) | Target Nasional (2023) | Realisasi |
|----|-------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|-----------|
| 1. | Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>modern contraceptive rate (mCPR)</i>) | (Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah PUS) *100% | 79,41% | 68,73% | 82,80% |

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Berdasarkan table 3.2 dan 3.3 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TRF) per WUS usia 15-49 Tahun pada akhir Tahun 2023 belum dapat diketahui, karena data realisasi dari provinsi belum keluar.

Untuk capaian indikator sasaran yaitu Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) tercapai sebesar 82,80%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penguatan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas

Dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka telah ditetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB diantaranya standar pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di seluruh Kabupaten Lamongan yang telah mencapai 58 Faskes KB, serta manajemen ketersediaan dan distribusi alat obat kontrasepsi (alokon).

Dengan dukungan anggaran yang ada terdapat peningkatan Pembinaan peserta KB, baik menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka



Panjang (MKJP) maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif, dan efisien), dan peningkatan penanganan KB secara persalinan

2. Peningkatan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan berkeluarga.

Peningkatan peran mitra kerja secara terpadu dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan kearifan lokal, perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi dan pernikahan usia anak.

3. Peningkatan pelaksanaan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Penguatan advokasi dan KIE untuk terus melaksanakan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) baik melalui pendekatan Media KIE maupun Media Sosial yang sesuai dengan kearifan budaya lokal. Selain itu dengan adanya Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN) yang masih dimanfaatkan dengan baik.

Berikut ini adalah uraian capaian indikator kinerja program teknis yang terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu:

- a. Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 82,80%, tercapai 100% dari target 79,41% yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena maksimalnya penggerakan yang dilakukan agar masyarakat bersedia menjadi peserta KB dan mengikuti pelayanan kontrasepsi. Semua jajaran DPPKB termasuk lini lapangan yaitu PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD telah memberikan Informasi, edukasi tentang pentingnya Penggunaan alat kontrasepsi dan pentingnya membina keluarga kecil yang berkualitas.

- b. Persentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 22,29 % tercapai 100% dari target 22,24 % yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena maksimalnya pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan KB terutama di Praktek Mandiri Bidan serta melalui Mobil Pelayanan (Moyan) untuk melayani kebutuhan pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi belum terpenuhi.
- c. Dokumen Kebijakan Kependudukan yang dihasilkan telah tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Dokumen tersebut terkait kajian pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk yang dibuat untuk menentukan arah kebijakan serta rencana kerja pengendalian penduduk pada tahun berikutnya.
- d. Cakupan anggota poktan yang aktif dalam pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL pada tahun 2023 tercapai 100%. Dengan target sebesar 70,52% dan realisasi sebesar 70,57%. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh penyuluhan dan penggerakan serta komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh para Kader BKB, BKR, dan UPPKS untuk senantiasa aktif melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

A. 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi KB Aktif dan penurunan kelahiran di Kabupaten Lamongan, diperlukan berbagai dukungan sumber daya baik SDM, Dana maupun Sarana Prasarana. Dalam hal penggunaan Sumber Daya Manusia, untuk mewujudkan target urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diperlukan adanya dukungan Penyuluh Keluarga Berencana yang mencukupi. Sebagaimana jumlah desa di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 474 Desa, maka idealnya diperlukan 1 Penyuluh Keluarga Berencana untuk 2 Desa. Hal ini tentu berbanding jauh dengan

kondisi *real* saat ini dimana DPPKB Kabupaten Lamongan hanya memiliki 66 Penyuluh Keluarga Berencana. Sehingga masih begitu banyak kekurangan Penyuluh Keluarga Berencana. Solusi yang saat ini masih bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa) atau Sub PPKBD dengan memberikan operasional bagi penyuluhan yang mereka laksanakan.

Untuk dukungan sarana dan prasarana di DPPKB Kabupaten Lamongan sudah cukup memadai, diantaranya sejumlah mobil operasional yang sudah diadakan baik dengan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun yang diadakan dengan dana daerah APBD. Segala dukungan sarana prasarana telah diupayakan agar dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan demi mewujudkan pencapaian sasaran strategis DPPKB Kabupaten Lamongan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD, RENSTRA OPD maupun RENJA DPPKB Kabupaten Lamongan.

Terkait dukungan dana yang telah dianggarkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan DPPKB Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, seperti yang telah disampaikan sebelumnya diatas bahwa sumberdaya dana yang tersedia sebesar Rp. 21.600.178.460,00 sedangkan total dana yang terealisasi sebesar Rp. 22.296.081.000,00 sisa dana sebesar Rp. 695.902.540,00 yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Selanjutnya, agar diketahui seberapa efektifnya efisiensi anggaran yang sudah dilakukan, berikut ini disampaikan Tabel yang memuat data terkait penggunaan anggaran DPPKB Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2023.

TABEL. 3.3.1
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % CAPAIAN |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------|
| Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) | 13.508.132.446 | 13.840.944.400 | 97,60% |

TABEL. 3.3.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

| Sasaran | Indikator | %Capaian Kinerja | % Capaian Anggaran | %Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) | 104% | 97,60% | 6,4% |

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan pada tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa selama Tahun 2023 telah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) karena penyesuaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamongan.

A.7 Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

| No | Sasaran / Program | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | |
|----|---|---|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sasaran: Mengendalikan Angka Kelahiran | Angka Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Rate (mCPR)) | 79,41% | 82,80% | 104% |
| 2. | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Kebutuhan Data Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia akurat dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Program Pembinaan Keluarga Berencana | Persentase KB MKJP | 22,24% | 22,29% | 100% |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Cakupan Anggota yang aktif dalam pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL | 70,52% | 70,57% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Program yang mendukung sasaran Renstra Dinas PPKB Kabupaten Lamongan dapat dianalisis sebagai berikut :

Untuk Kelahiran sendiri dari sisi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Prevalensi kontrasepsi modern sampai dengan tahun 2023 tercapai 104 % dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena maksimalnya PPKBD dan Sub PPKBD serta PKB/PLKB dalam memberikan Informasi tentang pentingnya

Penggunaan alat kontrasepsi dan pentingnya membina keluarga kecil yang berkualitas.

- b. Persentase KB MKJP s.d Tahun 2023 tercapai sebesar 22,29% dari target yang ditetapkan yaitu 22,24%, hal ini disebabkan karena maksimalnya pelayanan KB khususnya Metode jangka panjang di fasilitas kesehatan.
- c. Persentase Anggota Kelompok BKB yang ber-KB tercapai 100%, hal ini didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) baik yang dilaksanakan di posyandu maupun pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan yang khusus dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan keluarga pada bidang Balita sekaligus juga untuk mengarahkan keluarga Anggota BKB untuk aktif mengikuti Program KB.

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 22.296.081.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 21.600.178.460,00 atau 96,88%. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut:

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| A. | Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana | 22.296.081.000,00 | 21.600.178.460,00 | 96,88% |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.455.136.600,00 | 8.092.046.014,00 | 95,71% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 411.800.000,00 | 388.576.240,00 | 94,36% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | 25.000.000,00 | 21.940.000,00 | 87,76% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Daerah | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 312.000.000,00 | 308.940.000,00 | 99,02% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 74.800.000,00 | 57.696.240,00 | 77,13% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.042.621.294,00 | 4.785.106.302,00 | 94,89% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.193.421.294,00 | 4.606.066.912,00 | 94,84% |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 64.200.000,00 | 63.321.900,00 | 98,63% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 32.196.300,00,00 | 30.553.900,00 | 94,90% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 32.803.700,00 | 31.163.590,00 | 95,00% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 53.282.000,00 | 1.500.000,00 | 2,82% |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 53.282.000,00 | 1.500.000,00 | 2,82% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 122.996.000,00 | 119.941.157,00 | 97,52% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.500.000,00 | 9.499.300,00 | 99,99% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.749.700,00 | 9.748.700,00 | 99,99% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 41.680.200,00 | 41.607.800,00 | 99,83% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.460.600,00 | 17.460.500,00 | 100% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.644.500,00 | 8.520.000,00 | 98,56% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.961.000,00 | 33.105.157,00 | 92,06% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 227.232.500,00 | 227.102.000,00 | 99,94% |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 227.232.500,00 | 227.102.000,00 | 99,94% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 715.766.000,00 | 693.835.352,00 | 96,94% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 128.400.000,00 | 114.105.792,00 | 88,87% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 587.366.000,00 | 579.729.560,00 | 98,70% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.881.438.806,00 | 1.875.984.963,00 | 99,71% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.619.406,00 | 42.520.000,00 | 99,77% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.866.400,00 | 44.807.900,00 | 99,87% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.800.000,00 | 10.794.000,00 | 99,94% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.783.153.000,00 | 1.777.863.063,00 | 99,70% |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 349.068.400,00 | 288.933.550,00 | 82,77% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 62.268.400,00 | 46.827.500,00 | 75,20% |
| | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | - | 0,00% |
| | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | 10.000.000,00 | 9.999.950,00 | 100,00% |
| | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 10.000.000,00 | 9.999.300,00 | 99,99% |
| | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 32.268.400,00 | 26.828.250,00 | 83,14% |
| | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 286.800.000,00 | 242.106.050,00 | 84,42% |
| | Perumusan Parameter Kependudukan | 15.200.000,00 | 15.199.900,00 | 100% |
| | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | 15.000.000,00 | 14.999.800,00 | 100,00% |
| | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 69.600.000,00 | 69.600.000,00 | 100,00% |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 187.000.000,00 | 142.306.350,00 | 76,10% |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 6.235.746.000,00 | 6.142.698.090,00 | 98,51% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.903.850.000,00 | 1.854.527.040,00 | 97,41% |
| | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 111.927.000,00 | 99.607.450,00 | 88,99% |
| | Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 150.000.000,00 | 149.880.400,00 | 99,92% |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) | 359.073.000,00 | 359.073.000,00 | 100,00% |
| | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 1.202.850.000,00 | 1.169.156.240,00 | 97,20% |
| | Pengendalian Program KKBPK | 80.000.000,00 | 76.809.950,00 | 96,01% |
| | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 1.598.400.000,00 | 1,597.163.000,00 | 99,92% |
| | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 80.000.000,00 | 79.647.500,00 | 99,56% |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.518.400.000,00 | 1.517.515.500,00 | 99,94% |
| | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 948.396.000,00 | 918.363.600,00 | 96,83% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 35.473.600,00 | 33.833.600,00 | 95,38% |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 885.922.400,00 | 870.330.000,00 | 98,24% |
| | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 27.000.000,00 | 14.200.000,00 | 52,59% |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 1.785.100.000,00 | 1.772.644.450,00 | 99,30% |
| | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,00% |
| | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 1.776.100.000,00 | 1.763.644.450,00 | 99,30% |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 7.256.130.000,00 | 7.076.500.806,00 | 97,52% |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 7.126.130.000,00 | 6.968.480.880,00 | 97,79% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 360.000.000,00 | 359.989.980,00 | 100,00% |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS | 6.555.600.000,00 | 6.415.350.000,00 | 97,86% |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 160.530.000,00 | 148.965.900,00 | 92,80% |
| | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 50.000.000,00 | 44.175.000,00 | 88,35% |
| | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 130.000.000,00 | 108.019.926,00 | 83,09% |

| No. | Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|--|----------------|-----------------|--------|
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 80.000.000,00 | 79.469.926,00 | 99,34% |
| | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 50.000.000,00 | 28.550.000,00 | 57,10% |

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi dana sebesar Rp.62.268.400,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dan Pemanfaatan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan), implementasi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan informal serta jalur informal di kegiatan kelompok kegiatan masyarakat binaan yaitu pemberian informasi sekaligus sarpras agar masyarakat luas lebih paham akan kependudukan, dan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.46.827.500,00.
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 286.800.000,00 yang dipergunakan untuk Penyusunan buku parameter kependudukan, buku kajian dampak kependudukan, Pencatatan dan pelaporan data keluarga dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB adapun realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 242.106.050,00

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.903.850.000,00 yang dipergunakan untuk Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja, promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBK melalui rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) serta Pengendalian program KKBK . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.854.527.040,00 atau 97,41 %
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.598.400.000,00- yang dipergunakan untuk Pembinaan IMP dan program KKBK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.597.163.000,00 atau 99,92 %
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 948.396.000,00 yang dipergunakan untuk Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 918.363.600,00 atau 96,83%
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.785.100.000,00 adapun realisasi keuangan sebesar Rp.



1.772,644.450,00 atau 99,30 % yang digunakan untuk pembinaan KB dan pengelolaan Kampung KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang digunakan untuk peningkatan pengetahuan terkait ketahanan keluarga berikut dengan pengadaan sarana prasarana (BKB Kit Stunting), Penyediaan biaya operasional bagi pendampingan catin, bumil, dan pasca lahir dengan dana alokasi Rp. 7.126.130,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.968.480,880,00.
- b. Pelaksanaan dan peningkatan person serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi sebesar Rp.130.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp.108.019.926,00.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2023, baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan antara lain:

- Minimalnya kesertaan ber-KB Pria (MOP);
- Tidak seimbangnya jumlah PKB di Kabupaten Lamongan dengan wilayah binaan;
- Terbatasnya anggaran untuk kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL), karena selama ini kegiatan tersebut hanya dilakukan pada pembinaan di Kampung KB (111 Kampung KB);
- Terbatasnya sarana BKB Kit, BKL Kit, dan Kit Siap Nikah di Desa Lokus Stunting;
- Minimnya honor TPK (Tim Pendamping Keluarga) terhadap pendampingan pada catin, bumil, ibu pasca bersalin, dan baduta/balita;
- Rendahnya sasaran penerima hibah ATTG pada kelompok UPPKA;
- Masih kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan pentingnya pengendalian penduduk.



B. **Saran**

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program.
2. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.
3. Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Lamongan, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



drg. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199303 2 007